

KEBERADAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) HUNTU SELATAN KECAMATAN BULANGO SELATAN

Salmia S. Abaidata¹, Umar Sako Baderan², Nur Eng Mokodompit³

^{1,3}Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ilmu Sosial,

²Program Studi S1 Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial,

Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Jln. Prof Dr. Mansoer Pateda, Pentadio Timur, Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo. 96181

usbaderan@umgo.ac.id

ABSTRACT

Village-Owned Enterprises (BUMDes) are one of the instruments established by the government to improve rural community economies through independent and sustainable management of local potential. The existence of BUMDes is expected to encourage community welfare and strengthen rural economic development. This study aims to determine the existence and role of BUMDes in Huntu Selatan Village, South Bulango District, in supporting community economic improvement. This research employed a qualitative approach using observation, interviews, and documentation techniques for data collection. The results show that the existence of BUMDes Huntu Selatan has had a positive impact on improving the community's economy, particularly through business capital loan programs for small communities. Until 2019, the funds managed by BUMDes reached Rp282,000,000 with 78 customers. The existence of BUMDes has helped the community develop productive businesses such as grocery stores, cake production, food stalls, and other small businesses. However, several obstacles were still found, including delays in loan repayments and limited business unit development. Therefore, improving management quality, strengthening human resources, and developing business units are necessary to ensure the sustainability of BUMDes and increase its benefits for the rural community.

Keywords: BUMDes, rural economy, community empowerment, rural development

ABSTRAK

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu instrumen yang dibentuk pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa melalui pengelolaan potensi lokal secara mandiri dan berkelanjutan. Keberadaan BUMDes diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat pembangunan ekonomi desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan dan peran BUMDes di Desa Huntu Selatan Kecamatan Bulango Selatan dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes Huntu Selatan memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya melalui program pinjaman modal usaha bagi masyarakat kecil. Hingga tahun 2019, dana yang dikelola BUMDes mencapai Rp282.000.000 dengan jumlah nasabah sebanyak 78 orang. Keberadaan BUMDes dinilai mampu membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha produktif, seperti usaha kios, pembuatan kue, rumah makan, dan usaha kecil lainnya. Meskipun demikian, masih

ditemukan beberapa kendala, seperti keterlambatan pengembalian pinjaman dan keterbatasan pengembangan unit usaha. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas pengelolaan, penguatan sumber daya manusia, dan pengembangan unit usaha agar keberadaan BUMDes dapat terus berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat desa.

Kata Kunci: BUMDes, ekonomi desa, pemberdayaan masyarakat, pembangunan desa

PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan salah satu bagian penting dalam pembangunan nasional karena sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal di wilayah pedesaan dan menggantungkan kehidupan ekonominya pada sektor pertanian serta usaha kecil masyarakat (Jayadinata & Pramandika, 2006). Oleh karena itu, pembangunan desa perlu diarahkan pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat desa. Salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam mendukung pembangunan desa adalah melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Keberadaan regulasi tersebut memberikan ruang bagi desa untuk mengelola potensi ekonomi secara mandiri demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Ridlwan, 2014).

BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dibentuk dan dikelola oleh pemerintah desa bersama masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan BUMDes diharapkan mampu menjadi wadah pengelolaan

potensi desa secara produktif dan berkelanjutan melalui berbagai kegiatan usaha yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat desa (PKDSP, 2007). Selain sebagai lembaga ekonomi, BUMDes juga memiliki fungsi sosial karena berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan pelayanan ekonomi di desa (Alkadafi, 2014). Dengan demikian, BUMDes tidak hanya berfungsi untuk memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi juga sebagai sarana penguatan kapasitas masyarakat desa dalam mengelola usaha secara mandiri.

Pemerintah memberikan perhatian besar terhadap pengembangan BUMDes sebagai bagian dari implementasi pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat. Melalui BUMDes, desa diharapkan mampu mengelola potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia secara mandiri sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa (Agunggunanto et al., 2016). Keberadaan BUMDes juga menjadi salah satu strategi pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran di wilayah pedesaan melalui pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat. Pengelolaan BUMDes yang baik

diharapkan mampu menciptakan kemandirian ekonomi desa dan memperkuat pembangunan desa secara berkelanjutan.

Desa Huntu Selatan merupakan salah satu desa di Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango yang telah membentuk BUMDes sejak tahun 2018. BUMDes Huntu Selatan menjalankan kegiatan usaha berupa pemberian pinjaman modal usaha kepada masyarakat desa. Program tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha produktif dan meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Hingga tahun 2019, dana yang dikelola oleh BUMDes Huntu Selatan mencapai Rp282.000.000 dan telah dimanfaatkan oleh 78 orang masyarakat sebagai penerima pinjaman modal usaha. Keberadaan program tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui penguatan usaha mikro masyarakat desa.

Keberadaan BUMDes Huntu Selatan dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam membantu pengembangan usaha kecil seperti usaha kios, pembuatan kue, rumah makan, dan usaha produktif lainnya. Program pinjaman modal usaha yang dijalankan BUMDes memberikan akses permodalan yang lebih mudah bagi masyarakat dibandingkan lembaga keuangan lainnya. Kondisi ini sejalan dengan tujuan BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa yang berorientasi pada

pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal (Ridlwan, 2014). Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, seperti keterlambatan pengembalian pinjaman dan keterbatasan pengembangan unit usaha. Selain itu, kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan BUMDes juga masih perlu ditingkatkan agar pengelolaan usaha dapat berjalan lebih efektif dan profesional.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan BUMDes Huntu Selatan Kecamatan Bulango Selatan serta mengkaji perannya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian mengenai pemberdayaan ekonomi desa melalui BUMDes serta menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan BUMDes di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam mengenai keberadaan dan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Huntu Selatan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan berdasarkan fakta dan fenomena yang

ditemukan selama penelitian berlangsung (Moleong, 2018).

Penelitian dilaksanakan di Desa Huntu Selatan Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada keberadaan BUMDes yang aktif menjalankan program pinjaman modal usaha bagi masyarakat desa. Fokus penelitian diarahkan pada keberadaan BUMDes serta perannya dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha desa dan pemberian bantuan modal usaha kepada masyarakat.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan kepala desa, pengurus BUMDes, dan masyarakat penerima manfaat program BUMDes. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui dokumen resmi, laporan kegiatan BUMDes, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan pengelolaan BUMDes dan pembangunan ekonomi desa (Sugiyono, 2019).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas pengelolaan BUMDes dan kegiatan usaha masyarakat penerima pinjaman modal. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan informan yang berkaitan dengan penelitian untuk memperoleh informasi mengenai keberadaan dan manfaat BUMDes bagi masyarakat desa. Adapun dokumentasi dilakukan dengan

mengumpulkan berbagai dokumen dan data pendukung yang relevan dengan penelitian, seperti laporan keuangan BUMDes dan data penerima bantuan modal usaha.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 2014). Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara sistematis untuk memperoleh gambaran mengenai keberadaan BUMDes serta dampaknya terhadap peningkatan ekonomi masyarakat Desa Huntu Selatan. Dengan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai peran BUMDes dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat desa..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Huntu Selatan memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat desa. BUMDes yang dibentuk sejak tahun 2018 tersebut menjalankan kegiatan usaha berupa pemberian pinjaman modal usaha kepada masyarakat dengan tujuan membantu pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat desa. Program tersebut menjadi salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan usaha kecil dan menengah di desa.

Berdasarkan hasil penelitian, dana yang dikelola oleh BUMDes Huntu Selatan hingga tahun 2019 mencapai Rp282.000.000 dan telah dimanfaatkan oleh 78 orang masyarakat sebagai penerima pinjaman modal usaha. Dana tersebut digunakan oleh masyarakat untuk mengembangkan berbagai jenis usaha produktif, seperti usaha kios, pembuatan kue, rumah makan, dan usaha kecil lainnya. Keberadaan bantuan modal usaha tersebut dinilai sangat membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa BUMDes memiliki peran strategis sebagai lembaga ekonomi desa yang mampu memberikan akses permodalan kepada masyarakat dengan persyaratan yang lebih mudah dibandingkan lembaga keuangan lainnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Ridwan (2014) yang menyatakan bahwa BUMDes merupakan instrumen penting dalam penguatan ekonomi desa dan pemberdayaan masyarakat.

Selain memberikan akses modal usaha, keberadaan BUMDes Huntu Selatan juga membantu masyarakat dalam mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman berbunga tinggi yang dilakukan oleh rentenir. Masyarakat menilai bahwa sistem pinjaman yang diterapkan oleh BUMDes lebih ringan dan fleksibel sehingga lebih membantu dalam pengembangan usaha produktif masyarakat desa. Keberadaan

BUMDes tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan ekonomi berbasis desa mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat apabila dikelola secara baik dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat desa (Agunggunanto et al., 2016).

Dari aspek pengelolaan, BUMDes Huntu Selatan dinilai telah menjalankan pengelolaan usaha secara cukup baik meskipun masih memiliki keterbatasan. Pengurus BUMDes berupaya menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana masyarakat. Pemerintah desa juga melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BUMDes agar pelaksanaan program berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengelolaan yang baik menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa yang berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Alkadafi, 2014).

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala. Salah satu kendala utama adalah keterlambatan pengembalian pinjaman oleh sebagian masyarakat penerima modal usaha. Kondisi tersebut memengaruhi perputaran dana BUMDes dan menghambat pengembangan program usaha lainnya. Selain itu, rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman juga menjadi

tantangan dalam pengelolaan BUMDes.

Kendala lain yang ditemukan adalah keterbatasan pengembangan unit usaha BUMDes. Hingga saat ini, BUMDes Huntu Selatan masih berfokus pada kegiatan pemberian pinjaman modal usaha dan belum mengembangkan unit usaha lain yang berpotensi meningkatkan pendapatan desa. Padahal, desa memiliki berbagai potensi ekonomi yang dapat dikembangkan, seperti usaha pertanian, perdagangan, dan usaha produktif lainnya. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dan pengembangan unit usaha baru agar keberadaan BUMDes dapat lebih optimal dalam mendukung pembangunan ekonomi desa.

Selain faktor pengelolaan, kualitas sumber daya manusia juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan BUMDes. Pengurus BUMDes masih memerlukan peningkatan kapasitas dalam bidang manajemen usaha, administrasi, dan pengelolaan keuangan agar pengelolaan BUMDes dapat berjalan lebih profesional dan efektif. Penguatan kapasitas sumber daya manusia dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan keberlanjutan usaha BUMDes di masa mendatang.

Keberhasilan BUMDes Huntu Selatan juga dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat dan dukungan pemerintah desa. Tingginya minat masyarakat dalam memanfaatkan program pinjaman modal usaha

menunjukkan bahwa masyarakat merasakan manfaat langsung dari keberadaan BUMDes. Dukungan pemerintah desa melalui pengawasan dan pembinaan secara rutin juga menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan program BUMDes. Hal ini menunjukkan bahwa kerja sama antara pemerintah desa, pengurus BUMDes, dan masyarakat sangat diperlukan dalam menciptakan pengelolaan BUMDes yang efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, dapat dipahami bahwa keberadaan BUMDes Huntu Selatan memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat desa melalui pemberian akses modal usaha dan pemberdayaan masyarakat. Meskipun masih menghadapi berbagai kendala, keberadaan BUMDes tetap memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan ekonomi masyarakat desa. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengelolaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan unit usaha yang lebih inovatif agar keberadaan BUMDes dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Huntu Selatan Kecamatan Bulango Selatan memberikan dampak positif terhadap

peningkatan ekonomi masyarakat desa. Program pinjaman modal usaha yang dijalankan oleh BUMDes mampu membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha produktif dan meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Keberadaan BUMDes juga memberikan akses permodalan yang lebih mudah bagi masyarakat dibandingkan lembaga keuangan lainnya sehingga membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan usaha secara mandiri.

Selain memberikan manfaat ekonomi, keberadaan BUMDes juga berperan dalam mendukung pemberdayaan masyarakat desa melalui penguatan usaha kecil dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi desa. Pengelolaan BUMDes yang dilakukan oleh pemerintah desa dan pengurus BUMDes dinilai cukup baik serta mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, seperti keterlambatan pengembalian pinjaman oleh sebagian masyarakat penerima modal usaha dan keterbatasan pengembangan unit usaha BUMDes. Selain itu, kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan BUMDes masih perlu ditingkatkan agar pengelolaan usaha dapat berjalan lebih efektif, profesional, dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan pengelolaan BUMDes melalui peningkatan kapasitas sumber

daya manusia, pengembangan unit usaha yang lebih inovatif, serta penguatan sistem pengawasan dan pembinaan dari pemerintah desa. Dengan adanya langkah tersebut, keberadaan BUMDes diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., & Darwanto. (2016). Pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, 13(1), 67–81.
- Alkadafi, M. (2014). Penguatan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal El-Riyasah*, 5(1), 32–46.
- Jayadinata, J. T., & Pramandika, A. (2006). *Pembangunan desa dalam perencanaan*. Bandung: ITB Press.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (3rd ed.). California: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- PKDSP. (2007). *Panduan pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.

-
-
- Ridlwani, Z. (2014). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pembangunan perekonomian desa. *Jurnal Fiat Justisia*, 8(3), 424–440.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutopo, H. B., & Arief, A. (2010). *Metodologi penelitian kualitatif*. Surakarta: UNS Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.